

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DALAM MENINGKATKAN
KINERJA MANAJEMEN
(STUDI KASUS PDAM TIRTA BANTIMURUNG KAB.MAROS)**

SKRIPSI

OLEH

FIRDAUS

105730469014



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DALAM MENINGKATKAN
KINERJA MANAJEMEN
(STUDI KASUS PDAM TIRTA BANTIMURUNG KAB.MAROS)**



FIRDAUS

10573 04690 14

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen (Studi Kasus PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros)”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak. Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, SE., MM dan Bapak Abd Salam, SE., M.Si. Ak. CA selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Kedua orang tuaku, serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
7. Pimpinan serta pegawai PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Buat teman-teman akuntansi 2 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Makassar, 03 September 2019

Penulis

ABSTRAK

FIRDAUS, (2019) Evaluasi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen (Studi Kasus PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Idham Khalid dan Pembimbing II Abd. Salam.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kab.Maros dan juga untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan mendeskripsikan data-data dari obyek penelitian yang terkait dengan topik penelitian untuk mengungkapkan pelaksanaan dengan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan manajemen keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya sehingga dapat melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu pengelolaan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bagian keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros berpengaruh signifikan positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan PDAM Kab.Maros.

Kata kunci: peran manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, efisiensi dan efektivitas, laporan keuangan.

ABSTRACT

FIRDAUS, (2019) Evaluation of Financial Management of Regional Drinking Water Companies in Improving Management Performance (Case Study of PDAM Tirta Bantimurung, Maros Regency), Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Idham Khalid and Advisor II Abd. Salam.

This study aims to determine the efficiency and effectiveness of financial management, Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Bantimurung, Kab. Maros and also to measure the extent of success of the company's financial management. This study uses qualitative research methods, namely research that describes and describes data from research objects related to research topics to reveal implementation by assessing the level of efficiency and effectiveness.

This research is also expected to be an input for the company and financial management of PDAM Tirta Bantimurung, Maros Regency in order to be able to improve the competence of its human resources so that it can carry out its role as a guarantor of the quality of corporate financial management. The results of this study indicate that the role of the financial part of PDAM Tirta Bantimurung, Kab. Maros has a significant positive effect in improving the quality of financial management of PDAM Maros.

Keywords: the role of financial management, financial management, efficiency and effectiveness, financial statement.

MOTTO

“Allah Tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai kesanggupannya”.(Q.S Al Baqarah: 286)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar Ra’d:11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT. atas rahmat yang diberikan
- Ibu, Bapak, serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan.
- Teman-teman Organisasi terkhusus IPM dan IMM yang selalu bertanya ‘kapan sarjana’.
- Squad AK2-14 yang selalu membantu dalam memberikan masukan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Air
Minum Dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen."

(Studi Kasus PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros)

Nama : Firdaus

Nim : 105730469014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi ini telah di Seminar Hasilkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019

Makassar, 30 Juni

2019 Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Idham Khalid, SE.,MM
NIDN: 0931126103

Abd Salam, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN: 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE. MM
NBM : 903078

Dr Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA
NBM: 1073428

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
LAMPIRAN.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Manajemen Keuangan.....	7
B. Perusahaan Daerah.....	17
C. Pengertian Efektivitas Dan Efisiensi.....	21
D. Penelitian Terdahulu.....	22
E. Kerangka Fikir.....	28

BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data... ..	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Analisis.....	30
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Berdirinya PDAM Kab.Maros.....	32
B. Kedudukan Tugas Dan Fungsi.....	33
C. Struktur Organisasi.....	34
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengelolaan Keuangan	44
B. Analisis Deskripsi Data Keuangan Perusahaan.....	58
C. Pembahasan.....	65
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 1.2	Laporan Laba/Rugi Unaudited	58
Tabel 1.3	Perkembangan Rasio Pendapatan Dan Beban	60
Tabel 1.4	Rasio Perbandingan Pendapatan Dan Beban	61
Tabel 1.5	Neraca Komparatif	62
Tabel 1.6	Laporan Laba/Rugi Unaudited	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran	28
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan secara umum adalah suatu usaha untuk memperbaiki kondisi hidup dengan menunjukkan pada kemajuan sosial dan ekonomi. Melalui pembangunan diusahakan ada perubahan dari kondisi pasif, statis, dan tertinggal menjadi aktif, dinamis, serta masyarakat yang lebih maju dalam upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara pada saat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Setiap kegiatan usaha membutuhkan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan. Modal tersebut sangat berperan bagi perusahaan dalam mengelola usahanya agar dapat berkembang sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat.

Sistem permodalan untuk golongan pengusaha ekonomi lemah sangat penting baginya untuk memperhatikan pengelolaan modal perusahaan. Karena permodalan yang dikelola secara profesional dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang. Khususnya perusahaan dibawah naungan pemerintah daerah ada yang kemudian menjadi kewajiban tersendiri atas pendiriannya. Perusahaan tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah tersebut. Untuk mencapai kepada hal itu artinya keuntungan perusahaan harus selalu meningkat dan hal yang dapat menunjang peningkatan tersebut adalah modal yang dikelola secara profesional.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi daerah kemudian dilembagakan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN (1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan roda usahanya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diamanahkan tiga misi penting, yaitu sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (*agent of development*). BUMD bergerak dalam berbagai sektor, seperti jasa keuangan dan perbankan, jasa pengelolaan, dan penyediaan air bersih serta berbagai bentuk jasa dan usaha produktif lainnya.

Kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi berbagai lapisan masyarakat. Karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah memahami pentingnya air bersih bagi penunjang kehidupan yang sehat. Oleh karena itu PDAM hadir ditengah lapisan masyarakat sebagai perwujudan dari otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah yang dilakukan melalui berbagai arah kebijakan. Salah satunya adalah desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah. Implikasi dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mendongkrak sumber-sumber penerimaan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perusahaan Daerah Air Minum terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. PDAM yang merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih ini diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum juga merupakan badan usaha yang menjalankan dua fungsi yaitu sebagai kantor pelayanan yang baik dalam penyediaan air bersih dan juga bertujuan untuk menghasilkan laba sebagai penunjang kebutuhan perusahaan dan beroperasi dalam kegiatannya untuk sumber penerimaan daerah. Maka dari itu sudah sangat jelas setiap perusahaan yang didirikan sudah pasti memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik.

Terkhusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya dalam pengelolaan keuangan karna untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan yaitu tergantung dari berapa banyak profit yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik, efisien dan efektif. Dengan demikian bagian keuangan perlu melakukan penilaian atas pengelolaan keuangan dari tahun-ketahun untuk memperoleh gambaran tentang kondisi perkembangan keuangan perusahaan. Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh informasi apakah terjadi kemunduran atau peningkatan, terutama peningkatan kinerja keuangan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu perusahaan daerah yang tentunya akan berkontribusi dalam menambah pendapatan asli daerah perlu memperbaiki dan meningkatkan pengelolannya. Kebijakan dan aturan-aturan perlu dibuat dan dijabarkan dengan jelas untuk

mendukung pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akurat sesuai standar yang ditetapkan dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan yaitu laba. Dengan pengelolaan keuangan yang baik kita dapat pula mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Salah satu perusahaan daerah air minum (PDAM) yang selalu berbenah dan memperbaiki kinerja keuangannya adalah PDAM Kab. Maros. Perusahaan daerah ini memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kab. Maros selain potensi wisata yang merupakan primadona PAD Kab. Maros. Selama ini dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maros juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berkaitandengan manajemen fungsional perusahaan yang meliputi: manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kemudian faktor eksternalnya meliputi aspek ekonomi, politik, hukum, teknologi kependudukan, dan sosial budaya.

Hal ini mengharuskan PDAM Kab. Maros yang juga bernama PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros harus terus berbenah diri dalam menghadapi tantangan yang lebih besar untuk dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusaah daerah ini selalu mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terutama para pengguna jasa yaitu masyarakat sebagai pelanggan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pelanggan air minum yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shabo Hernoko dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (Studi Kasus PDAM Tirta Perwitasari Kab. Purworejo) menunjukkan bahwa PDAM Tirta Perwitasari

sebaiknya memanfaatkan idle capacity untuk perputaran usaha mendayagunakan kondisi solvable untuk perluasan cakupan layanan dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk menurunkan rasio rentabilitas. (2012)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros dan bagaimana kebijakan akuntansi dan keuangan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan yang baik, efisien dan efektif. Oleh karena itu penulis memilih judul Penelitian yaitu "EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM MENINGKATKAN KINERJA MANAJEMEN" dengan studi kasus PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kab. Maros dalam meningkatkan kinerja manajemen.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Kab. Maros dalam meningkatkan kinerja manajemen.

D.Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti untuk digunakan sebagai bahan informasi dan masukan-masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang kajian tentang pengelolaan keuangan perusahaan dan juga penilaian tingkat keberhasilan pihak manajemen dalam mengelola keuangan.

2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya sehingga dapat melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberi masukan (*consulting assurance*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan yang dahulunya dikenal dengan nama Ilmu Belanja atau Pembelanjaan Perusahaan baru berkembang dan di perkenalkan pada abad XX. Sekarang ini ilmu Manajemen Keuangan telah berkembang secara pesat. Hal itu dapat kita lihat dari buku-buku dan literatur yang membahas mengenai manajemen keuangan.

Suatu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan bahwa manajemen keuangan di dalam perkembangannya memiliki penekanan-penekanan khusus sesuai dengan tingkat perkembangan dunia usaha dalam kurung waktu yang melatarbelakanginya serta memiliki wana sesuai dengan situasi perekonomian pada masa-masa tersebut.

Dalam perkembangan ilmu belanja sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada awal abad XX, penekanan masalah dititik beratkan pada segi-segi hukum yang menyangkut merger, konsolidasi, pembentukan badan usaha baru, serta surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Industrialisasi yang melanda daratan eropa pada masa itu, khususnya setelah berakhirnya perang dunia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun kembali industri yang hancur selama perang dunia I tersebut ataupun dalam rangka memperbesar industri yang ada. Sebaliknya, kita ketahui bahwa pada masa tersebut pasar modal masih belum berkembang dan pengerahan dana dari investor perseorangan dalam masyarakat kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukannya masih sangat sulit. Neraca dan perkiraan laba rugi masih sulit

untuk dipercayai karena masih bersifat intern dan belum lazim di audit oleh Akuntan Publik.

Tidaklah mengherankan jika pada masa tahun 1920-an itu ilmu belanja lebih menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah yang menyangkut segi hukum dari surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan atau penarik dana.

Penekanan atas segi hukum dan perundang-undangan yang berlaku berlangsung terus sampai terjadinya depresi dunia yang dikenal dengan nama "malese" pada tahun 1929. Akibatnya banyak perusahaan yang bangkrut sehingga ilmu belanja mulai memusatkan perhatiannya pada masalah yang berkaitan dengan kebangkrutan dan reorganisasi, likuiditas, badan usaha, serta peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut masalah pasar uang dan modal.

Walaupun dalam periode ini ilmu belanja masih merupakan suatu ilmu yang bersifat deskriptif dan legalitas, penekanannya sudah mulai beralih dari hal-hal yang berkaitan dengan ekspansi usaha kepada usaha-usaha yang bersifat deskriptif dan legalistik, penekanannya sudah mulai beralih dari hal-hal yang berkaitan dengan ekspansi usaha kepada usaha-usaha yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di dalam masa yang serba sulit pada saat itu. Jadi, secara keseluruhan ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah yang konseptif teoritis dalam lingkungan yang dinamis dan dalam suatu kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.

Ketika Joel Dean (1951) menerbitkan dan menyebarkan bukunya yang berjudul *Capital Budgetting*, masalah bagaimana menganalisis investasi jangka

panjang atau evaluasi proyek investasi mulai mendapat perhatian yang besar dari para manager keuangan. Hal ini tersebut sekaligus mengubah fokus manajemen keuangan bidang korporasi dari bidang operasional menuju ke arah konsep biaya modal, struktur modal, investasi, dan sekaligus penilaian perusahaan. Sementara itu, pada dekade 1970-an, Markowitz, Sharpe, dan Lintner melakukan pembaruan dalam menilai risiko dan hasil yang didasarkan pada konsep teori portofolio. Konsep-konsep seperti *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*, *Capital Market Line (CML)*, dan *Security Market Line (SML)* turut berkembang pesat.

Pertumbuhan Ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi dalam pembiayaan, seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, dan akuisisi.

Dewasa ini penekanan atas perlunya pengambilan putusan yang harus dilakukan oleh para manager keuangan sangat mewarnai literatur-literatur yang membahas masalah manajemen keuangan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- A.) Pada umumnya orang sekarang ini berpendapat bahwa putusan di dalam masalah investasi jangka panjang memerlukan suatu perhitungan atas biaya modal.
- B.) Sumber-sumber dana yang tersedia sangat terbatas sehingga diperlukan pengetahuan untuk menarik dana dari sumber-sumber yang terbatas tersebut agar diperoleh tingkat bunga yang dapat dipertanggungjawabkan (ekonomis)
- C.) Di tahun-tahun belakangan ini banyak dilakukan penggabungan usaha (*merger*) oleh perusahaan-perusahaan sehingga timbul suatu

kecenderungan bagi perusahaan lainnya untuk juga mempertimbangkan hal yang sama di dalam usahanya untuk memperbesar perusahaan yang ada. Dalam hal ini peranan putusan manager keuangan sangat menentukan.

D.) Dengan berkembang pesatnya kemajuan di dalam bidang perhubungan dan komunikasi antar negara, banyak perusahaan yang tertarik untuk melibatkan diri di dalam transaksi keuangan yang bersifat internasional. Dengan demikian diperlukan keahlian dan teknik serta metode yang akurat di dalam menghindari risiko, baik yang berkaitan dengan perdagangan antar negara maupun di dalam menghindari risiko atas gejolak mata uang asing dan tingkat suku bunga.

E.) Situasi perekonomian yang berubah secara cepat serta tingkat laju inflasi yang tinggi pada masa sekarang ini perlu mendapat perhatian yang khusus dan serius dari para manager keuangan. Putusan yang diambilnya tidak dapat lepas dari situasi yang tersebut di atas.

1. Fungsi Dan Peranan Manajer Keuangan

Sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen keuangan ini, fungsi dan peranan seorang manager keuangan menjadi lebih luas daripada hanya mencari dana dan mengalokasikan dana tersebut di dalam perusahaan. Dalam manajemen keuangan moderen sekarang ini fungsi manager keuangan dapat dibagi dalam tiga macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Menetapkan Pengalokasian Dana (*Investment Decision*)

Fungsi ini mencakup putusan yang harus dilakukan oleh manager keuangan di dalam menetapkan kombinasi dari aset yang paling baik bagi perusahaan. Baik investasi dalam modal kerja maupun harta tetap perusahaan,

keduanya perlu mendapatkan perhatian yang seksama agar tercipta pendayagunaan dana yang optimal. Penetapan besarnya investasi dalam yang kas, piutang dagang, dan persediaan merupakan tugas manager keuangan untuk memutuskan dan memantaunya agar tercipta keseimbangan antara unsur likuiditas dan rentabilitas di dalam perusahaannya. Sebaliknya, atas investasi jangka panjang, yang manfaatnya baru dapat dinikmati dimasa mendatang, akan membawa suatu risiko yang harus dianalisis terhadap return yang akan diperoleh.

b) Menentukan Deviden

Kewajiban manager keuangan di dalam menetapkan kebijakan pembagian deviden merupakan fungsi yang tak dapat diremehkan karena akan mempengaruhi nilai dari perusahaan tersebut. Nilai perusahaan akan memberikan citra kemakmuran para pemilik perusahaan. Dalam rangka pengambilan keputusan ini seorang manager keuangan perlu menentukan berapa besarnya laba bersih perusahaan yang akan dibagikan sebagai deviden sehingga kemakmuran para pemilik perusahaan dapat diamankan. Di dalam menetapkan kebijakan deviden, seorang manager keuangan dituntut untuk menganalisis sampai seberapa jauh pembiayaan dari dalam perusahaan itu sendiri yang akan dilakukan oleh perusahaan yang dapat di pertanggung jawabkan.

Hal ini mengingat bahwa hasil operasi yang ditanamkan kembali ke dalam perusahaan sesungguhnya merupakan dana pemilik perusahaan yang tidak dibagikan sebagai deviden tunai. Oleh sebab itu atas dasar perimbangan antara risiko dan hasil perlu diputuskan apakah lebih baik hasil operasi tersebut

dibagikan saja sebagai deviden ataukah ditanamkan kembali ke dalam perusahaan.

Berdasarkan ketiga fungsi pokok manager keuangan di atas, tujuan tersebut harus diarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan yang dilihat dari sudut pandangan manajemen pembelanjaan, yaitu “maksimalisasi” nilai perusahaan bagi para pemiliknya.

Dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan, seorang manager keuangan harus tetap berpedoman pada keseimbangan antara likuiditas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. Kedua faktor tersebut bergerak secara berlawanan. Jika perusahaan terlalu menekankan likuiditas dan rentabilitas dapat berkurang dan begitu pula sebaliknya.

Salah satu contoh dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika perusahaan sangat berhati-hati dan terlalu mementingkan tingkat likuiditas yang harus dipertahankannya, perusahaan cenderung untuk menahan banyak uang kas. Dan seperti yang kita ketahui bahwa uang kas yang terlalu banyak merupakan “dana yang mengganggu” (*idle of funds*) sehingga situasi itu akan menurunkan tingkat rentabilitas perusahaan dan sebaliknya.

Selanjutnya, istilah “memaksimalkan” memang digunakan dan bukan mengoptimalkan nilai karena di dalam pengertian memaksimalkan tercermin adanya pembatasan-pembatasan, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1). Kepentingan manajemen perusahaan tidak selalu sama dengan kepentingan pemegang saham di dalam suatu perusahaan. Ada pemisahan yang tegas antara pemilik modal dan manajemen. Seorang manager keuangan yang baik akan berusaha mencapai hasil yang paling maksimal dengan risiko yang

menurutnya masih berada dalam batas-batas yang wajar dan layak untuk ditanggungnya.

2). Dalam dunia modern masa kini aspek sosial dan lingkungan hidup merupakan suatu faktor yang dapat membatasi kegiatan perusahaan di dalam mencapai hasil yang seoptimal mungkin.

Dengan demikian manajer keuangan dalam mencari dana dan mengalokasikan dana tersebut ke dalam investasi yang dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keberhasilan suatu perusahaan (Organisasi Bisnis) akan senantiasa dilihat dari sudut keuntungan maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka panjang serta sangat bergantung pada fungsi dan tugas seorang manajer keuangan.

Manajemen Keuangan (financial management) juga berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama: investasi, pendanaan, dan manajemen aset.

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata "to manage" yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi pada kurun waktu tertentu.

Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaannya pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan.

a) Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2. Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who dan how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
- Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
- Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
- Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

3.Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

- Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindarkan dari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- Fleksibel yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- Mempunyai stabilitas yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali di ubah atau tidak dipakai sama sekali.
- Meliputi semua tindakan yang diperlukan yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

4.Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- Menetapkan tugas dan tujuan
- Mengobservasi dan menganalisa

-Mengadakan kemungkinan-kemungkinan

-Membuat sintesa

B. Perusahaan Daerah

Berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara terperinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau perinciannya.

Menurut *Ensiklopedia Bebas Wikipedia*, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaanya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

-Perusahaan Ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.

-Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengelola/lahan.

-Perusahaan Industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai gunanya.

-Perusahaan Perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan.

-Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No.3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang

dokumen perusahaan. Menurut pasal 1 Huruf b UU No.3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini :

- Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan maupun badan usaha.
- Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
- Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Selain bentuk perusahaan negara dan daerah yang berbentuk PT Persero dan Perum, maka di daerah terdapat juga bentuk perusahaan daerah (PD) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dengan dasar hukum tersebut, maka saat ini di berbagai daerah dijumpai bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dalam pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk

sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya pasal 4 ditentukan bahwa:

-Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undang-undang ini.

-Perusahaan daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut.

-Perusahaan daerah seperti yang termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Dengan statusnya sebagai badan hukum, maka pertanggung jawaban pemegang saham dan direksi tentunya terbatas sesuai dengan tanggungjawab pada perseroan terbatas.

Sesuai dengan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1962, maka tujuan perusahaan daerah diatur, sebagai berikut:

(1) Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

-Memberi jasa.

-Menyelenggarakan kemanfaatan umum.

-Memupuk pendapatan

(2) Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

(3) Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok pemerintah daerah.

(4) Cabang-cabang produksi yang penting daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”. mengenai perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat Memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ciri-ciri perusahaan daerah adalah:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.

2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

C. Efisiensi Dan Efektifitas

a. Pengertian Efisiensi Dan Efektifitas

Efektivitas Dan Efisiensi adalah dua kata yang saling berdekatan dan sering bersinggungan yang sering kita gunakan dalam tata bahasa sehari-hari terutama untuk anda yang sering berkecimpung dalam teknik, tata cara, optional dan procedural.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat

dievaluasi dengan penilaian-penilaian relative, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Efektifitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama.

D. Penelitian Terdahulu

Rona Yunita Nugraheni dan Zainal Hidayat melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yaitu keselarasan peraturan/kebijakan, keadaan tanggap darurat, sinkronisasi kebijakan kepala daerah, kepentingan politik. (2015)

Abd. Aziz, Akmal Riza, dan Anwar melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Di Pemerintah Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran yang baik pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh berfungsi sebagai jaminan untuk kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan terarah yang lebih baik. (2016)

Kaswandi melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Negeri 027 Tarakan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan yang diharapkan karena penyaluran dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat

pada bulan pertama. Sekolah sudah tidak memunggut dana dari orang tua/masyarakat karena semua sudah mampu terdani dengan adanya dana BOS APBN sebagai dana BOS tidak untuk membeli buku teks pelajaran karena digunakan untuk kepentingan yang lain, dan dana BOS tidak tercukupi dalam program sedangkan penggunaan BOS didasarkan atas keputusan dalam rapat paripurna AKS dan penggunaan dana telah sesuai dengan hasil rapat penyusunan dana BOS. Dalam pengawasan keuangan dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa. Sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dilakukan tiap 1 tahun sekali. (2015)

Mega F. dan Syahril Ventjellat melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung adalah Sangat Efektif. (2015)

Yantie melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kinerja Unit Pembayaran Untuk Efektivitas Pengelolaan Keuangan Blud Pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin". Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk realisasi belanja sampai dengan bulan lalu atau sampai dengan bulan November 2015 hanya mencapai Rp. 11.268.701.239 (Sebelas milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau 52% (lima puluh dua persen), ini dapat dikatakan belum efektif dilihat dari jumlah anggaran dikarenakan sebagian pejabat pelaksana kegiatan belum melaksanakan kegiatan tersebut. (2015)

Apriliana Somborarak melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di desa Loa Janan Ulu bisa dikatakan efektif hal ini kita dapat lihat dari penggunaan dana alokasi yang bukan hanya di gunakan untuk pembiayaan administrasi kantor Desa Loa Janan tetapi di gunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat. (2014)

I Putu Miartana dan I Made Hardiyasa melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Rasio-Rasio Keuangan Daerah Di Provinsi Bali (2010-2014)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali secara rata-rata nilainya diatas 100% tepatnya 118,32% ini berarti selama lima tahun anggaran dari 2010 sampai 2014 Pemerintah Provinsi Bali dikategorikan sangat efektif. (2016)

Taufik Kurrohman melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan uji beda statistik non parametrik yaitu wilcoxon signed rank test menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan koefisien. Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif. (2013)

Eko Setiawan dan Raja Muhammad Amin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Manajemen Keuangan Desa Di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan

keuangan desa maredan dalam keadaan yang cukup baik mengingat dalam proses pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa dilakukan dengan melakukan perencanaan dan melihat program apa saja yang paling penting serta dibutuhkan masyarakat. (2015)

Rismawaty NainuJullie J.Sondakh dan Novi S.Budiarso melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama” Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai/melebihi anggaran pendapatan yang ditetapkan. (2017)

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Judul	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	Rona Yunita Nugraheni, Zainal Hidayat (2015) “Evaluasi Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Semarang”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yaitu keselarasan peraturan/kebijakan, keadaan tanggap darurat, sinkronisasi kebijakan kepala daerah, kepentingan politik.
2.	Abd. Aziz, Akmal Riza, Anwar (2016) “Pengaruh Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data penelitian untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen variable) terhadap variabel terikat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran yang baik pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh berfungsi sebagai jaminan untuk kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan terarah yang lebih baik.

	Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh”	(dependen variable), dengan analisis regresi linear berganda.	
3.	Kaswandi(2015) “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Neg 027 Tarakan”	Deskriptif Kualitatif .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan yang diharapkan karena penyaluran dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama.
4.	Mega F. SyahrilVentje Ilat (2015) “Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung”	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung adalah Sangat Efektif.
5.	Yantie (2015) “Evaluasi Kinerja Unit Pembayaran Untuk Efektivitas Pengelolaan Keuangan Blud Pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin”	Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk realisasi belanja sampai dengan bulan lalu atau sampai dengan bulan November 2015 hanya mencapai Rp. 11.268.701.239, dan ini dapat dikatakan belum efektif.
6.	Apriliana Somborarak (2014) “Evaluasi Program Alokasi Dana Desa Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara”	Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di desa Loa Janan Ulu bisa dikatakan efektif.

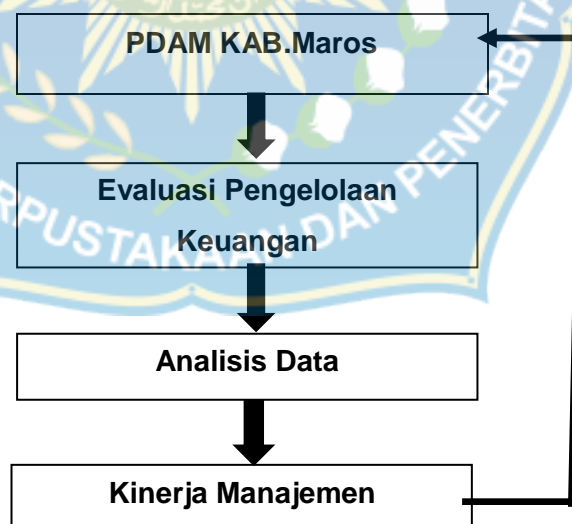
7.	I PutuMiantana, I Made Hardiyasa (2016) "Evaluasi Kinerja Rasio-Rasio Keuangan Daerah Di Provinsi Bali (2010-2014)"	Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik wawancara dan studi dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dikatagorikan sangat efektif.
8.	Taufk Kurrohman (2013) "Evaluasi Penggangan Berkas Kinerja Keuangan Yang Berkas Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur"	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta dan keadaan sebenarnya	Hasil pengujian dengan menggunakan uji beda statistik non parametrik yaitu wilcoxon signed rank test menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan pengangan berkas kinerja.
9.	Eko Setiawan, Raja Muhammad Amin (2015) "Evaluasi Manajemen Keuangan Desa Di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak"	Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa maredan dalam keadaan yang cukup baik.
10.	Rismawaty Nainu, JullieJ. Sondakh,NoviS. Budiarso (2017) "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Program Dukungan Mnajaemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Agama Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Kantor Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara	Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat studi deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai/melebihi anggaran pendapatan yang ditetapkan.

E. Kerangka Pikir

Dalam Penelitian ini penulis lebih berfokus kepada efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan untuk mencapai sistem pengelolaan yang baik salah satu yang menjadi tolak ukur ialah efektivitas dan efisiensinya dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu peran bagian keuangan dalam mengelola laporan keuangan yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap penilaian suatu kinerja baik kinerja bagian keuangan maupun kinerja dari pihak manajemen dalam mengelola keuangan.

Kerangka pemikiran teoritis yang kemudian dirumuskan ialah sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk meningkatkan kinerja manajemen adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data deskriptif kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan untuk mengungkapkan pelaksanaan dengan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (Siregar, 2012). Data primer berupa penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini, data ini diperoleh dari informasi berupa buku, internet, *literature* lain atau data yang sudah ada seperti penelitian ekonomi tentang audit internal yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya. Data sekunder berupa laporan keuangan PDAM Kab. Maros.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros yang berlokasi di Jl. Asoka No. 4 Pettuadae, Turikale, Kab. Maros Sulawesi Selatan. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa data dokumen dan hasil wawancara dan hasil kuisisioner sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi dan Wawancara

Yaitu pengamatan dan secara langsung untuk mengumpulkan data yang akan mendukung penelitian dan juga mengajukan pertanyaan secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah angket dan alat perekam untuk merekam hasil wawancara. Pengukuran efisiensi dan efektivitas menggunakan indikator rasio aktivitas dan juga melalui wawancara.

F. Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam mengolah data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif yaitu dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan pada sistem pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh PDAM TIRTA BANTIMURUNG Kab. Maros agar dapat melihat sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui indikator tertentu kemudian

menginterpretasikan berdasarkan indikator tersebut sebagai suatu hasil penelitian.

Indikator tingkat efisiensi dan efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui data kuisioner yaitu dengan cara:

1. Tingkat Efisiensi

Total Assets Turn Over adalah perbandingan antara penjualan dan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam suatu periode tertentu. Hal ini memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. *Total Assets Turn Over* diukur dari volume penjualan semakin besar rasio ini maka kondisi operasional perusahaan semakin baik.

2. Tingkat Efektivitas

Rasio Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*) adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Nilai modal kerja bersih diperoleh dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja dikatakan efektif berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan operasional.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PDAM Kab. Maros

Pengelolaan saham air di Kabupaten Maros dimulai pada tahun 1987 berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 539/3039/Sekda, tanggal 12 Oktober 1987 dan nama Badan Usaha Pengelaaan Air Minum (BPAM) yang berada dibawah koordinasi Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pada periode 1988 sampai dengan 1989 dengan ketentuan dana APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) dari pemerintah prancis, mulailah dilakukan pemasangan jaringan transmisi dan distribusi dalam wilayah Kabupaten Maros.

Selanjutnya pada tahun 1990 PDAM Kabupaten Maros yang berada dibawah koordinasi Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia mulai beroperasi dengan jumlah pelanggan yang masih sangat terbatas, hanya melayani dalam wilayah Kota Maros.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan tuntutan keadaan, dan dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan air minum berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.72/KPTS/1993 tanggal 17 Februari 1993, usaha pengelolaan air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, beralih status dari BPAM (Badan Pengelola Air Minum) menjadi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Berdasarkan pada Peraturan Daerah No.7 Tahun 1993 tentang tujuan pendirian perusahaan ialah turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah

dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja khususnya di daerah Kabupaten Maros.

B.Kedudukan Tugas Dan Fungsi

A. Kedudukan

- a) Perusahaan Daerah adalah pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan air minum.
- b) Perusahaan Daerah diselenggarakan atas asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui badan pengawas.

B.Tugas Pokok

Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengelolaan air minum.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Perusahaan Air Minum memiliki fungsi:

- a) Melaksanakan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat konsumen dalam penyediaan air bersih.
- b) Menyelenggarakan pemanfaatan umum yang dirasakan oleh masyarakat

C.Struktur Organisasi

1. Direksi

Direksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

a) Memimpin Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas.

b) Mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

c) Dengan persetujuan dan pemberian kuasa dari Kepala Daerah/Badan Pengawas, Direksi dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perjanjian atas nama Perusahaan Daerah untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun.
- 2) Mengadakan pinjaman.
- 3) Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
- 4) Mengadakan investasi baru.
- 5) Mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar pengadilan.
- 6) Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.
- 7) Mengusulkan tarif air minum kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

d) Menyusun dan mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 3 Bulan sebelum tahun buku mulai berlaku untuk dimintakan persetujuan dari kepala Daerah melalui Badan Pengawas

e) Menyusun tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan dan melaksanakannya setelah persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

f) Setiap akhir tahun buku Direksi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

g) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan peraturan kepegawaian perusahaan yang berlaku.

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Badan Pengawas.

i) Dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

2. Direktur Utama

a) Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah dalam bidang teknik pengelolaan air bersih dan bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan.

b) Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c) Membina hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun dengan sesama Perusahaan Daerah Air Minum.

d) Memimpin perencanaan dan pelaksanaan kerja masing-masing satuan organisasi yang dibawahinya dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Daerah.

e) Bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perusahaan Daerah, menandatangani surat perintah, mengeluarkan uang, giro dan cek.

f) Menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.

g) Menandatangani keputusan Direksi dan Naskah Dinas lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan Daerah.

h) Menerima laporan dari bawahan atau staffnya dan mengevaluasi laporan tersebut untuk menahan pengambilan keputusan.

i) Melaksanakan tanggungjawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah.

j) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

k) Direktur Utama dibantu oleh:

Direktur Bidang Administrasi Dan Keuangan

- a) Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang hubungan langganan, administrasi umum dan keuangan.
- b) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan serta perlengkapan.
- c) Merencanakan dan mengendalikan pendapatan dan belanja serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan.
- d) Mengawasi penyusunan anggaran belanja menetapkan besarnya modal kerja perusahaan memuaskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan yang lebih efisien dan efektif.
- e) Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender.
- f) Mengatur cara pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.
- h) Dalam melaksanakan tugas Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- i) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan dibantu oleh:

4. Bagian Umum

- a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi perbekalan dan perawatan, seksi gudang, seksi karyawan.
- b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, umum serta perlengkapan kantor.
- c) Mengkoordinir, memeriksa, merawat, memperbaiki dan memelihara serta mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- d) Melaksanakan pengadaan/pembelian barang/material dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan.
- e) Mengadakan usaha pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan kantor.
- f) Mengendalikan semua barang dan peralatan yang menjadi milik Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhannya.
- g) Menyimpan dan mendistribusikan tiap jenis barang kepada semua unit sesuai keperluannya setelah mendapat pengesahan.
- h) Meneliti, mempelajari, dan melaksanakan petunjuk perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- i) Mengadakan investasi barang/peralatan yang menjadi milik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.
- j) Mengkoordinir/mengurus pelaksanaan asuransi barang-barang investasi perusahaan.

- k) Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.
- m) Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Administrasi dan keuangan.
- n) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Umum dibantu oleh:
 - 1. Seksi perbekalan dan Perawatan
 - 2. Seksi Gudang
 - 3. Seksi Karyawan

5. Seksi Karyawan

- a) Mengurus administrasi karyawan yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi promosi, pemberhentian, pensiun.
- b) Mempersiapkan dan menyusun syarat-syarat dan kualitas karyawan yang dibutuhkan.
- c) Menyusun rencana pendidikan dan latihan dan pengembangan karir karyawan.
- d) Menegakkan tata tertib dan disiplin karyawan.
- e) Mengusulkan pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar disiplin karyawan dan pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi/berjasa terhadap perusahaan.
- f) Menyusun/memeriksa daftar gaji dan tunjangan serta menghitung pajak penghasilan karyawan.
- g) Melakukan pengaturan pengurusan asuransi karyawan baik perorangan maupun atas nama perusahaan.

- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum.

6. Bagian Umum

- a) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Seksi Perencanaan Keuangan, Seksi Pembukuan, Seksi Kas, Seksi Penagihan dan rekening.
- b) Merencanakan mengendalikan pendapatan dan pembelanjaan serta kekayaan perusahaan.
- c) Merencanakan Mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang langganan.
- d) Menyelenggarakan penyusunan anggaran meneliti dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran anggaran perusahaan.
- e) Menyusun rencana *Cash Flow* dan *Cash budget*.
- f) Mempersiapkan dan merencanakan program penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi perusahaan.
- g) Mengendalikan pelaksanaan akuntansi perusahaan sesuai dengan prinsip yang berlaku dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
- h) Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan setiap satu bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk mencocokkan kebenaran saldo buku Bank Perusahaan dengan Rekening Koran Bank.
- i) Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.

- k) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- l) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh:
 - 1. Seksi Perencanaan Keuangan
 - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - 3. Seksi Kas
 - 4. Seksi Penagihan dan Rekening

7. Seksi Perencanaan Keuangan

Seksi Perencanaan Keuangan mempunyai tugas:

- a) Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugasnya.
- b) Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan berdasarkan Daftar Usaha Anggaran dari masing-masing bagian secara sistematis setiap tahun.
- c) Mencatat realisasi anggaran menurut mata anggaran yang terjadi setiap tahun.
- d) Membantu laporan secara periodik seperti bulanan/triwulan/tahunan mengenai realisasi anggaran dan perubahan anggaran.
- e) Secara berkala mengadakan perkiraan dan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran kas.
- f) Mempersiapkan dan mengusulkan kemungkinan perubahan anggaran.
- g) Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi lain yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya.
- h) Seksi Perencanaan Keuangan dikepalai oleh seorang seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

8. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

- a) Melaksanakan pekerjaan akuntansi perusahaan sesuai prinsip yang berlaku meliputi pencatatan pada buku harian, buku besar, buku bank, buku piutang, buku utang, dan buku lain yang berkaitan dengan Akuntansi Perusahaan Daerah.
- b) Menyiapkan neraca dan perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerah.
- c) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan perusahaan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

9. Seksi Kas

- a) Mengerjakan buku kas harian berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah.
- b) Membuka dan menutup register setiap hari untuk pengamatan penerimaan dan pengeluaran uang Perusahaan Daerah.
- c) Menyusun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai pendukung buku kas harian.
- d) Menerima setoran hasil tagihan rekening air/non air dan penerimaan lainnya.
- e) Melakukan pembayaran baik jasa maupun barang kepada pihak ketiga serta pembayaran kebutuhan lainnya sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- f) Melaksanakan penyetoran seluruh hasil penerimaan setiap hari ke bank dan menyimpan bukti-bukti setoran bank.
- g) Membuat laporan posisi kas setiap hari.

- h) Melaksanakan penyimpanan buku cek dan giro yang belum/sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan penyimpanan surat-surat berharga lainnya.
- i) Melayani pemeriksaan dengan sebaik-baiknya, baik yang dilakukan pihak intern maupun ekstern.
- j) Menjelaskan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

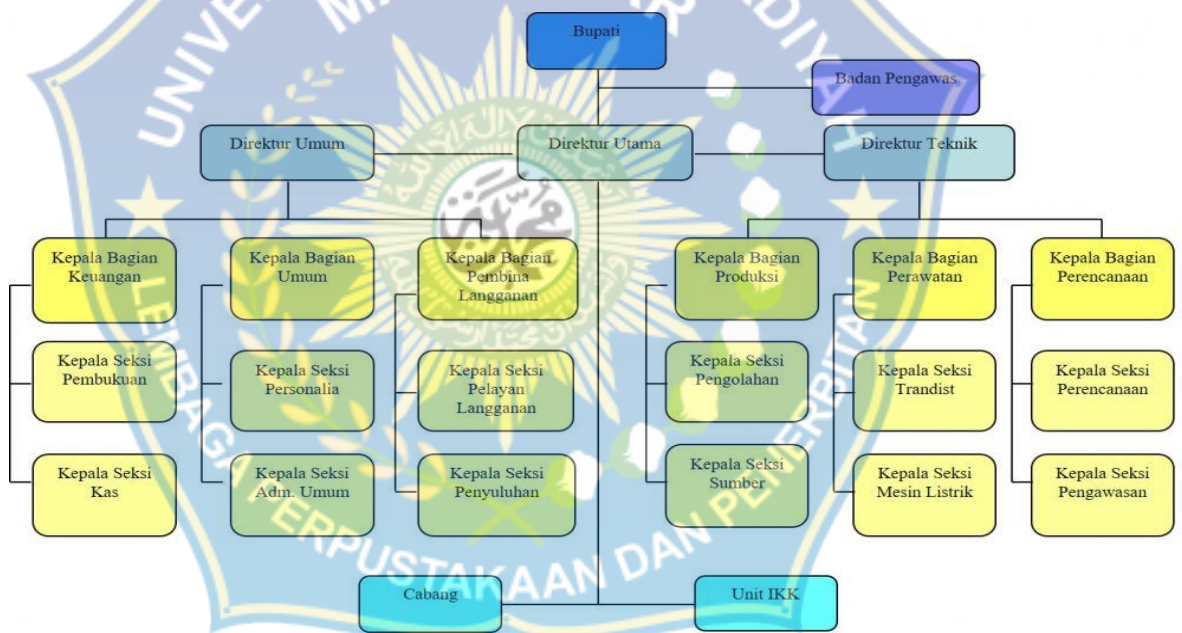
10. Direktur Bidang Teknik

- a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang produksi, distribusi, peralatan dan perencanaan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan air buku serta sumber lainnya, instalasi produksi dan sistem distribusi.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia.
- d) Mengadakan kerjasama dengan Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan dalam mengatur, mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan dalam bidang operasional.
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi.
- f) Memelihara hubungan baik antara instansi serta pihak tertentu dan mewakili perusahaan daerah dengan sepengetahuan Direktur Utama.
- g) Mengatur cara pelayanan yang sebaik-baiknya baik masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama
- i) Dalam melaksanakan tugas Direktur Bidang Teknik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

j) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Teknik dibantu oleh:

1. Bagian Produksi dan Laboratorium
2. Bagian Distribusi
3. Bagian Peralatan Teknis
4. Bagian Perencanaan Teknik

Gambar 1.2



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros

1. Sistem Akuntansi

Sistem pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros yang pada dasarnya merujuk pada sektor akuntansi publik.

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan umum dalam proses pembukuan:

1. Bagian yang menangani Akuntansi/Pembukuan bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada operasi harian Perusahaan Daerah Air Minum.

2. Pengakuan transaksi keuangan perusahaan dicatat dengan metode akrui yang berarti aktiva (hak) dan kewajiban begitu pula Pendapatan dan biaya diakui/dilaporkan pada periode terjadinya, walaupun penerimaan atas aktiva dan pendapatan serta pengeluaran untuk kewajiban dan biaya dapat terjadi dalam periode yang tidak sama.

3. Pencatatan transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, seperti penjualan air, penerimaan uang dan sebagainya dicatat kedalam buku harian/jurnal yang terdiri dari :

- a) Daftar voucher utang yang harus dibayar (DVUD)
- b) Jurnal rekening air dan non air (JR)
- c) Jurnal penerimaan kas/bank (JPKB)
- d) Jurnal pembayaran kas/bank (JBKB)
- e) Jurnal pemakaian bahan instalasi dan kimia (JPBIK)
- f) Jurnal umum (JU)

4. Transaksi-transaksi yang telah dicatat kedalam buku harian/jurnal pada akhir bulan dijumlahkan, kemudian dimasukkan (diposting) kedalam buku besar, kecuali jika diposting setiap terjadi transaksi.

5. Neraca lajur bulanan disusun berdasarkan angka-angka penjumlahan sisi debit dan kredit dalam buku besar pada bulan yang bersangkutan.

6. Dari neraca lajur dibuat laporan keuangan bulanan yang terdiri dari :

a) Neraca

b) Laporan laba-rugi

7. Buku-buku pembantu diselenggarakan sebagai rincian dari perkiraan-perkiraan buku besar tertentu. Tiap buku pembantu dibuatkan saldo per akhir bulan untuk dicocokkan/direkonsiliasi dengan saldo buku besar yang bersangkutan.

Siklus pencatatan pembukuan dapat digambarkan sebagai berikut :



Skema siklus pembukuan diatas menunjukkan bahwa proses pembukuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Kegiatan/Transaksi yang terjadi dicatat kedalam dokumen yang merupakan bukti dasar pembukuan.

b) Berdasarkan dokumen yang timbul transaksi keuangan dicatat dalam buku harian/jurnal bila diperlukan dokumen pendukung transaksi keuangan yang timbul, dicatat pula kedalam buku pembantu.

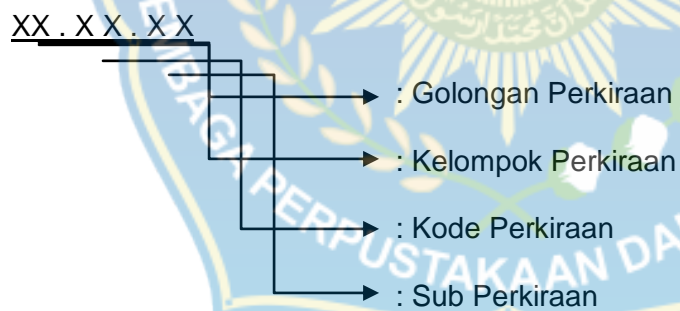
c) Jumlah komulatif transaksi yang ada pada buku harian/jurnal diposting ke dalam buku besar.

d) Dari buku besar dibuat neraca lajur sebagai media presentase untuk memudahkan penyusunan neraca dan laba rugi. Selanjutnya rincian yang diperlukan untuk pos-pos yang terdapat didalam kedua laporan tadi dapat dibuat buku.

Baganakun/perkiraan/rekening dimaksudkan sebagai pedoman untuk pencatatan transaksi-transaksi keuangan agar didapat suatu pengelompokan yang tertib dan seragam diseluruh PDAM.

Pengelompokan kode akun/perkiraan/rekening dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Setiap saldo dalam pos neraca dan perhitungan laba/rugi harus diambil dari saldo akun/perkiraan/rekening dan jumlah kelompok akun/perkiraan/rekening yang bersangkutan tanpa reklasifikasi.

Sistematika penomoran kode akun/perkiraan/rekening PDAM terdiri dari enam digit,dengan penjelasan sebagai berikut:



Untuk melengkapi penjelasan diatas, diberikan salah satu kodeakun/perkiraan/rekening sebagai contoh sebagai berikut:

Contoh kode akun/perkiraan/rekening:

13.01.20 adalah Piutang Rekening Air Kelompok Pelanggan II

13 .01 . 20



Kelompok Pelanggan II

Selanjutnya Piutang Rekening Kelompok Pelanggan II masih dapat dibagi ke dalam beberapa jenis Kelompok Pelanggan II. Pembagian lebih lanjut tergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh jika terdapat dua jenis Kelompok Pelanggan II misalnya Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Panti Asuhan, maka dapat digunakan sub kode perkiraan sebagai berikut:

13.01.21 = Piutang Rekening Pelanggan Rumah Sangat Sederhana

13.01.22 = Piutang Rekening Pelanggan Panti Asuhan

Pembahasan lebih lanjut mengenai bagan akun/perkiraan/rekening terdapat dalam modul penyusunan laporan keuangan.

2. Penyajian Dan Pelaporan

a) Penyajian

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan PDAM harus menyajikan dengan wajar neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros menyatakan secara eksplisit dan secara penuh dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kepatuhan terhadap SAK ETAP.

3. Kelangsungan Usaha

Manajemen pada saat menyusun laporan keuangan, harus membuat penilaian atas kemampuannya melanjutkan kelangsungan usaha. Dalam membuat penilaian, jika manajemen menyadari terdapat ketidak pastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka harus mengungkapkan ketidak pastian tersebut.

4. Frekuensi Pelaporan

PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimum sekali dalam setahun.

5. Konsistensi

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikanatas sifat operasi atau perubahan penyajian atau pengklasifikasianatau SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

6. Komparatif

PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuanganperiode berjalan.

7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Media pencatatan transaksi yang digunakan PDAM terdiri dari buku harian/jurnal, buku besar dan buku pembantu.

1. Buku Harian/Jurnal

Buku harian/jurnal yang biasa juga disebut sebagai buku/media pencatatan transaksi pertama (*book of original entry*), dilakukan secara harian dan ditutup pada setiap akhir bulan. Pada garis besarnya ada 2 (dua) jenis buku harian/jurnal, yaitu buku harian/jurnal khusus dan buku harian/jurnal umum. Dalam buku harian/jurnal khusus dicatat data transaksi keuangan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, sedangkan buku harian/jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat dalam buku harian/jurnal khusus.

Secara keseluruhan terdapat 6 (enam) buku harian/jurnal yang terdiri dari 5 (lima) buku harian/jurnal khusus dan 1 (satu) buku harian/jurnal umum yaitu:

1) DVUD-Daftar Voucher Utang yang harus Dibayar

Setiap transaksi biaya dan pembelian yang telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, harus segera dibuatkan bukti/pengakuan utang yang sah (voucher) yang merupakan dasar pencatatan kedalam DVUD. Selanjutnya berdasarkan DVUD ini dibuatkan jurnal kemasing-masing perkiraan biaya/aktiva yang bersangkutan dengan perkiraan lawan utang usaha/non usaha.

Dr. Persediaan
 Dr. Uang Muka Kerja
 Dr. Beban
 Cr. Utang Usaha/Non Usaha.....

Setelah pembayaran dilakukan, pada saat DVUD dicantumkan tanggal pembayaran dan nomor cek.

2) JR-Jurnal Rekening

Dipergunakan untuk menjurnal semua rekening/penjualan air dan pendapatan non air yang diterbitkan, termasuk semua koreksi atas rekening penjualan air dan pendapatan non air. Jurnal yang timbul dari JR:

Dr. Piutang Rekening Air
 Dr. Piutang Rekening Non Air
 Cr. Pendapatan Penjualan Air
 Cr. Pendapatan Non Air

3) JPKB-Jurnal Penerimaan Kas/Bank

Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi penerimaan kas/bank.

Jurnal penerimaan kas/bank:

Dr. Kas/Bank
 Cr. Piutang Rekening Air
 Cr. Piutang Rekening Non Air

4) JBKB-Jurnal Bayar Kas/Bank

Dipergunakan untuk menjurnal semua transaksi pembayaran kas/bank.

Jurnal pembayaran kas/bank:

Dr. Utang Usaha/Non Usaha
 Cr. Kas/Bank

5) JPBIK-Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia

Dipergunakan untuk menjurnal semua pemakaian/pengeluaran bahan, alat dan perlengkapan dan menjurnal semua koreksi atas pengeluaran bahan, alat dan perlengkapan. Jurnal pemakaian bahan instalasi dan kimia:

Dr. Aktiva Tetap Produktif
Dr. Aktiva Tetap dalam Penyelesaian
Dr. Beban Pemeliharaan
Dr. Beban Operasi Pengolahan Air
Dr. Rupa-Rupa
Cr. Persediaan Bahan Operasi Kimia
Cr. Bahan Instalasi

6) Jurnal Umum (JU)

Tidak semua transaksi keuangan dapat dicatat pada buku harian/jurnal khusus yang ada yaitu DVUD, JR, JPKB, JBKB, dan JPBIK. Oleh karena itu, untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam buku-buku harian khusus tersebut digunakan Buku Harian/Jurnal Umum termasuk penyesuaian (*adjustment*) yang diperlukan pada saat penyusunan laporan keuangan bulanan. Transaksi-transaksi yang lazimnya dibukukan ke dalam Buku Jurnal Umum, antara lain adalah:

- pencadangan biaya-biaya periodik (listrik, telepon dsb) yang terhitung pada akhir bulan.
- pembebanan biaya dibayar dimuka kedalam rekening biaya.
- penyusutan aktiva tetap.
- Debet/kredit nota.

- Penyisihan piutang.
- Penghapusan piutang tak tertagih.
- Penghapusan aktiva tetap.
- Koreksi pembukuan diluar koreksi rekening air.
- Lain-lain.

2. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat didalam buku-buku jurnal/harian pada tiap akhir bulan diposting (dibukukan berdasarkan perkiraannya masing-masing) ke dalam buku besar. Untuk transaksi yang dicatat kedalam buku jurnal umum, posting dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pencatatan kedalam jurnal umum tersebut. Angka-angka saldo buku besar selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Neraca Lajur.

3. Buku Pembantu

Buku ini harus dibuat sebagai rincian Buku Besar untuk perkiraan perkiraan tertentu. Dari buku pembantu yang ada dibuatkan daftar saldo pada setiap akhir bulan untuk dicocokkan dengan saldo perkiraan buku besar yang bersangkutan. Buku-buku pembantu yang terpenting antara lain adalah:

a) BPPP-Buku Pembantu Piutang Pelanggan

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar piutang pelanggan air dan non air.

b) BPU-Buku Pembantu Utang

Buku ini merupakan rincian perkiraan Buku Besar Utang. Setiap kreditur sebaiknya dicatat dalam satu kartu BPU.

c) KPS-Kartu Persediaan

Buku ini merupakan rincian perkiraan persediaan. Tiap jenis dan ukuran barang dalam persediaan sebaiknya dicatat dalam satu KPS.

4) BPAT-Buku Pembantu Aset Tetap

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar aset. Setiap aktiva tetap sebaiknya dicatat dalam satu kartu BPAT.

5) BPB-Buku Pembantu Beban

Buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar beban. Tiap perkiraan beban sebaiknya dicatat dalam satu kartu BPB.

b) Pelaporan Keuangan

1. Laporan Keuangan yang Lengkap

Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan.

a) Neraca

PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah. Neraca PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros minimal mencakup pos-pos berikut:

Kas dan setara kas, piutang usaha dan non usaha, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan non usaha, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- Dimiliki untuk diperdagangkan.
- Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau
- Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- Dimiliki untuk diperdagangkan.
- Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau
- Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

Pendapatan usaha dan non usaha, beban usaha dan non usaha, beban pajak, laba atau rugi neto. PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa. PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros menyajikan analisis beban berdasarkan sifat beban.

c) Laporan Perubahan Ekuitas

PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.

d) Laporan Arus Kas

PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.
- Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
- Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efekutang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).

- Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efekutang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setarakas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
- Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka.
- Pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.
- Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros.
- Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- Pelunasan pinjaman.
- Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Urutan penyajian CALK sebagai berikut:

- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

- Pengungkapan lain.

Berdasarkan pada sistem pengelolaan keuangan yang telah diuraikan di atas sesuai data hasil penelitian, kemudian didukung oleh hasil wawancara peneliti terhadap pimpinan dan karyawan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros. Wawancara yang peneliti lakukan terkait tingkat efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros. Hasil wawancara tersebut seperti berikut ini:

Abdul Rahmanto staff akuntansi mengatakan bahwa "kalau pengeloannya sudah efektif karena didalam aplikasinya ini semuanya sudah teratur mulai dari pengelolaan yang kas kecil sampai kas besar semuanya diinput secara teratur di aplikasi sikompak".

Arsila Bunga Staff kas keuangan mengatakan bahwa "menurut saya baik karena langsung sub keuangan yang bertanggung jawab adalah pengelola keuangannya masing-masing yang terdiri atas kas kecil, kas besar, dan kasir dan menurut saya semua pengelola keuangannya baik".

Merti Staff pengelola kas kecil mengatakan bahwa "yah bagus-bagus ajaji karena tidak ada ji pernah masalah begitue kalaupun ada masalah masalah kecilji bisa-bisaji deselesaikan toh, palingan yah mungkin cara penulisan atau apakah saja begituji".

Suriani Tamrin Staff Akuntansi mengatakan bahwa "kalau menurut saya sudah bagus karena lancarji semua tidak adaji hambatan apa".

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas kita dapat melihat bahwasanya sejauh ini sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros masih terbilang cukup baik. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dari hasil penelitian melalui penelusuran data keuangan yang penulis amati khususnya dibagian keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros. Namun demikian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros peneliti masih perlu melakukan suatu analisis lebih jauh melalui penelusuran pada data keuangan khususnya laporan keuangan periode 2013 sampai dengan 2017.

B. Analisis Deskripsi Data Keuangan Perusahaan

Berdasarkan pada data laporan laba rugi perusahaan terkhusus pada jumlah pendapatan perusahaan disitu kita dapat melihat bahwa jumlah angka pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain secara terus menerus meningkat sampai dengan tahun 2017. Berikut ini adalah tabel pelaporan pendapatan.

Tabel 1.2
Laporan Pendapatan
Per 31 Desember 2013 S/D 2107

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2014	31 Des 2015	31 Des 2016	31 Des 2017
Pendapatan usaha	9.481.420.902,40	11.851.776.128,00	14.814.720.160,00	18.518.400.200,00	21.481.799.900,00
Pendapatan lain-lain	316.708.722,69	395.885.903,36	494.857.379,20	618.571.724,00	213.477.210,95
Jumlah Pendapatan	9.798.129.625,09	12.247.662.031,36	15.309.577.539,20	19.136.971.924,00	21.695.277.110,95

Kita dapat melihat pada tahun 2013 ke tahun 2014 tingkat persentase peningkatan ini sampai dengan 25,00%. Kemudian berlanjut di tahun 2014 hingga sampai pada tahun 2015 presentase peningkatan ini terus berlanjut hingga sampai pada 25,00%.

Kemudian juga di tahun 2015 jumlah persentase peningkatan terus mengalami kenaikan sebesar 25,00% sampai pada tahun 2016 dan terus berlanjut hingga sampai pada tahun 2017 dengan tingkat presentase peningkatan sebesar 16,00%. Kinerja ini patut diapresiasi karna masih tetap mampu menjaga jumlah pendapatan usaha dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sedangkan dari segi jumlah pendapatan lain-lain jumlah presentase angka pendapatannya juga terus mengalami peningkatan yang sama dengan jumlah pendapatan usaha sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2013 kita

dapat melihat bahwa jumlah presentase pendapatan sebesar 25,00% hingga sampai pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Kemudian dari tahun 2014 jumlah presentase pendapatan lain-lain terus mengalami peningkatan sampai dengan 25,00% hingga sampai pada tahun 2015. Selanjutnya dari tahun 2015 ke tahun 2016 masih terus meningkat hinggamenyentuh angka 25,00% juga. Kemudian dari tahun 2016 ke 2017 tingkat presentase penurunan angka terjadi hingga sampai pada -65,48%.

Tetapi secara total keseluruhan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebesar 25,00% sampai pada tahun 2016. Dan mengalami penurunan sampai dengan 13,36% pada tahun 2017 dengan jumlah rata-rata keseluruhan 22,06%.

Dalam hal ini PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros sudah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Peningkatan pendapatan yang secara terus menerus meningkat ini disebabkan karena prosedur kerja yang dijalankan sesuai dengan sistem pengelolaan yang disepakati. Ini sudah membuktikan bahwa sistem pengelolaan yang dipakai sejauh ini masih terbilang baik dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada pengelolaan anggaran beban perusahaan terkhusus pada penggunaan anggaran beban operasional banyak terjadi pemborosan pada operasional perusahaan maupun karyawan. Sedangkan pada penggunaan anggaran beban non operasional PDAM juga harus mampu memperbaiki kondisi dalam dalam dua tahun terakhir terjadi pengkatan jumlah beban bahkan sampai dengan dua kali lipat di tahun 2017. Berikut ini adalah tabel laporan beban perusahaan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros periode 2013 s/d 2017.

Tabel 1.3

Laporan Beban Perusahaan

Per 31 Desember 2013/2017

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2014	31 Des 2015	31 Des 2016	31 Des 2017
Beban Operasional	9.605.476.324,14	12.006.845.405,17	15.008.556.756,46	18.760.695.945,58	21.131.972.710,69
Beban Non Operasional	6.865.275,00	6.865.275,00	6.865.275,00	8.581.594,58	12.867.701,33
Jumlah Beban	9.612.341.599,14	12.013.710.680,17	15.015.422.031,46	18.769.277.540,16	21.144.840.412,02

Tabel diatas kita dapat melihat bahwasanya perkembangan jumlah jumlah beban dari tahun ke tahun semakin meningkat ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dari segi penggunaan biaya anggaran masih belum efektif dalam pengelolaannya. Kita dapat melihat dari tahun 2013 sampai dengan 2014 tingkat presentase penggunaan anggaran operasional meningkat sebesar 25,00% Sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 peningkatannya pun masih sama yaitu 25,00%. Dan begitupun juga sampai tahun 2017 presentase penigkatan meningkat sampai pada 12,63%.

Sedangkan di beban non operesional peningkatan jumlah bebannya hampir tidak ada dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu tetap pada angka 6.865.275,00. Kemudian di tahun 2016 barulah terjadi peningkatan beban non operasional yaitu sebesar 25,00% dari tahun 2015 ke 2016. Di tahun 2017 peningkatan pun terjadi lebih pesat lagi karna meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 49,94%.

Berangkat dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengelolaan beban perusahaan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros harus lebih menekan lagi jumlah penggunaan anggaran. Peningkatan jumlah beban

inidisebabkan karena tingginya penggunaan anggaran khususnya pada operasional perusahaan maupun karyawan. Kemudian selain dari pada itu juga pada non operasional perusahaan terjadi pemborosan anggaran karena perusahaan mengucurkan dana kepada suatu pihak yang bersifat berlebihan. Oleh karenanya perusahaan harus mampu untuk dapat lebih menekan lagi penggunaan anggaran dan juga lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sistem pengelolaan khususnya pada beban perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang data perkembangan pendapatan dan beban yang terjadi pada periode 2013 sampai dengan 2017 pada PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros, maka dapat di analisis presentase tingkat efisiensi dan efektivitas melalui komparasi antara rasio perkembangan pendapatan dan rasio perkembangan beban. Analisa rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Perkembangan Rasio Pendapatan Dan Beban
Periode 2013 s/d 2017

Keterangan	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Rata-Rata
Pendapatan	24,90%	25,00%	25,00%	13,36%	22,06%
Beban	24,98%	24,98%	25,00%	12,65%	21,90%

Berdasarkan tabel perkembangan rasio pendapatan dan beban yang diatas. Dapat dilihat tingkat presentase perkembangan pada pendapatan dan beban mengalami terus peningkatan kecuali pada tahun 2016 ke 2017 tetapi secara keseluruhan rata-rata peningkatan pendapatan yaitu sebesar 22,06% dan juga beban yaitu sebesar 21,90% ini menunjukkan bahwasanya jumlah pendapatan masih lebih besar daripada beban yang dikeluarkan oleh

perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros cukup efektif dan efisien dipandang dari sudut pendapatan dan beban.

Selanjutnya pada neraca komparatif khususnya piutang perusahaan dapat dilihat bahwasanya tingkat piutang usaha perusahaan tidak normal. Terjadi penurunan dan peningkatan di beberapa tahun tertentu. Ini merupakan hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan. Berikut ini adalah tabel daftar piutang perusahaan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros periode 2013 s/d 2017.

Tabel 1.5
Perusahaan Daerah Air Minum Kab.Maros
Daftar Piutang
Per 31 Desember 2013/2017

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013
Piutang Usaha (NET)	4.074.266.771,20	3.022.452.323,94	1.916.345.642,96	2.115.094.858,19	3.022.452.323,94
Piutang Non Usaha (NET)	261.155.140,44	240.782.200,44	180.586.650,33	240.782.200,44	240.782.200,44
Jumlah Piutang	4.335.421.911,64	3.263.234.524,38	2.096.932.293,29	2.355.877.058,63	3.263.234.524,38

Tabel di atas kita dapat melihat bahwasanya tingkat presentase piutang usaha dari tahun 2013 ke tahun 2014 itu sudah mengalami kemunduran sampai kepada -30,02%. Kemudian disusul lagi di tahun 2014 ke 2015 dengan tingkat presentase -9,39%. Tetapi kemudian sampai pada tahun 2016 peningkatan kembali terjadi sampai dengan 57,71% angka yang dimunculkan sama dengan pada tahun 2013. Dan peningkatan ini terus terjadi sampai dengan tahun 2017 meskipun peningkatannya naik hanya naik 34,80%..

Setelah penjabaran diatas dapat dilihat prestasi PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros dalam menekan tingkat angka piutang usaha dari tahun 2013 sampai dengan 2015 itu sudah sangat baik. Tetapi kemudian di tahun 2016 tingkat

angka piutang usaha kembali meningkat sampai dengan tahun 2017 yang persentase rata-rata peningkatannya yaitu sampai dengan 46,25%. Ini menunjukkan bahwasanya dalam dua tahun terakhir PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros dalam menekan tingkat angka piutang usaha mengalami kegagalan.

Sedangkan disisi lain piutang non usaha PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros juga mendapatkan tantangan dalam pengelolaan piutang non usahanya. Kita dapat melihat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 total angka piutang non usaha yaitu sebesar 240.782.200,44 tidak ada penurunan maupun peningkatan jumlah angka. Kemudian di tahun 2015 tingkat presentase angka piutang usaha mengalami penurunan sampai dengan -25,00%.

Akan tetapi pada tahun 2016 jumlah total angka piutang non usaha kembali naik sama dengan tahun 2014 dan 2013 dengan presentase kenaikan sampai kepada 33,33% inilah yang kemudian menjadi tantangan besar PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros karena sampai dengan tahun 2017 total angka masih meningkat sampai dengan 8,46%. Meskipun Total peningkatan angka yang terjadi di dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan, tetapi ini dapat terus meningkat apabila tidak ada keseriusan dalam menekan total angka piutang non usaha tersebut. Dan sangat jelas akan berpengaruh kepada pengelolaan keuangan perusahaan dalam perumusannya.

Salah satu penyebab meningkatnya tingkat piutang PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros dua tahun terakhir ini yaitu disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang tidak membayar tepat pada waktunya. Sudah ada sanksi yang diberikan oleh para pelanggan yang tidak membayar tepat waktu. Tetapi ternyata sanksi itu tidak memberikan efek jera kepelanggan. Berdasarkan database

tersebut maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan yang dilihat dari sudut pandang piutang masih belum efisien dan efektif.

Kemudian selanjutnya pada laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan masih tetap mengalami peningkatan profit perusahaan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel daftar laporan laba/rugi perusahaan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros periode 2013 s/d 2017.

Tabel 1.6
Perusahaan Daerah Air Minum Kab.Maros
Laporan Laba/Rugi
Per 31 Desember 2013/2017

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2014	31 Des 2015	31 Des 2016	31 Des 2017
L/R Sebelum Pajak Penghasilan	185.788.025,95	233.951.351,19	294.155.507,74	367.694.383,84	550.436.698,93
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	137.366.029,00
Laba/Rugi Bersih	185.788.025,95	233.951.351,19	294.155.507,74	367.694.383,84	413.070.669,93

Tabel diatas kita dapat melihat peningkatan presentase jumlah L/R bersih perusahaan dari tahun 2013 hingga sampai tahun 2014 yaitu 25,92% lebih ini merupakan peningkatan dengan jumlah angka yang sangat signifikan.

Kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2015 angka itu masih terus meningkat dengan presentase peningkatan sebesar 25,73% peningkatan ini memang tidak terlalu signifikan. Terus pada tahun 2015 tingkat presentase terus meningkat sebesar 25,00% sampai pada tahun 2016. Hingga sampai pada tahun 2017 presentase peningkatan terus terjadi hingga sampai 12,34%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan laba dari tahun ke tahun. Pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros Secara keseluruhan dapat dikatakan cukup efisien dan efektif.

C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan para narasumber secara keseluruhan. Secara keseluruhan dapat dikatakan tingkat sistem pengelolaan keuangan yang saat ini dijalankan masih terbilang baik karena selama ini belum ada kendala besar yang dihadapi biasanya hanya persolan teknis. Oleh karena itu untuk mendukung pernyataan dari para narasumber. Analisis data laporan khususnya pada laporan beban dan piutang perusahaan dilakukan dengan penjelasan seperti berikut.

Pada penjelasan diatas kita dapat memahami bahwasanya ada beberapa hal yang kemudian menjadi kendala besar dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan. Dan tentunya dari semua itu akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan ketika halnya permasalahan ini secara terus menerus terjadi. Diluar daripada itu secara jelas tentunya bagaimanapun perusahaan ini masih tetap mampu meningkatkan tingkat Laba/Rugi Bersih dari tahun ke tahun. Bagi saya ini hal yang sangat patut untuk diapresiasi meskipun dalam perjalanannya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki khususnya pada tingkat efektivitas maupun efisiensi pengelolaannya masih kurang.

Terlebih dahulu kita dapat melihat dibagian pengelolaan piutang usaha sempat terjadi penurunan angka piutang usaha dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tetapi kemudian kembali naik dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Ini tentunya sangat memprihatinkan dalam dua tahun terakhir, diluar dari akan mempengaruhi proses pengelolaan keuangan tentunya ini juga akan menurunkan tingkat laba perusahaan pada setiap tahun yang berjalan ketika halnya ini tidak dikelola secara profesional dan tegas.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa tingkat pengelolaan keuangan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Ini disebabkan karena banyaknya pelanggan yang tidak membayar tagihan air tepat pada waktunya sehingga menyebabkan ketidakstabilan tingkat pendapatan setiap tahunnya. Pembayaran tagihan air yang tidak tepat waktu ini tentunya terjadi karena tidak adanya kesadaran dari para pelanggan itu sendiri dan juga karena sanksi bagi para pelanggar belum terlalu membuat mereka memberikan efek jera.

Oleh karena itu kedepan pihak manajemen perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan piutang usaha secara lebih profesional lagi dan tegas tentunya. Selain daripada itu juga pihak manajemen perusahaan harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggan yang melanggar.

Kemudian selanjutnya juga dari segi pengelolaan piutang non usaha. Kita dapat melihat bahwasanya tingkat pengelolaan piutang non usaha juga tidak selalu berhasil dari tahun ke tahun dalam menekan angkanya. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 kita dapat melihat tidak terjadi perubahan angka sama sekali. Kemudian ditahun 2015 barulah terjadi penurunan angka. Tetapi kemudian di tahun 2016 sampai 2017 peningkatan angka kembali terjadi. Meskipun peningkatan angkanya tidak terlalu signifikan, tetapi ini juga tentunya harus diantisipasi. Jangan sampai peningkatan terjadi di tahun-tahun selanjutnya, ini juga akan mempengaruhi kestabilan pengelolaan keuangan perusahaan tentunya. Saya berharap kepada pihak manajemen perusahaan bisa lebih tegas dan efektif lagi dalam mengelola piutang non usaha perusahaan.

Disisi lain masih ada yang kemudian tentunya harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini juga sangat mempengaruhi tingkat

efektivitas maupun efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan yaitu dari segi beban perusahaan baik beban operasional maupun beban non operasional.

Sedangkan dari segi beban operasional perusahaan kita dapat melihat bahwasanya jumlah angka beban operasional dari tahun ketahun terus meningkat. Ada beberapa faktor yang sebenarnya kemudian mempengaruhi kenapa beban operasional terus meningkat. Salah satunya ialah karena perusahaan juga semakin berkembang sehingga memakan pembiayaan yang lebih tentunya. Diluar dari pada itu juga tingkat penggunaan anggaran operasional perusahaan maupun karyawan juga terlalu boros. Oleh karenanya saya berharap kepada pihak manajemen dapat lebih mengefektifkan dan juga mengefisienkan penggunaan anggaran operasional perusahaan.

Kemudian pada beban non operasional perusahaan, kita juga dapat melihat bahwa dari tahun 2013 sampai 2015 tidak terjadi perubahan sama sekali. Dan kemudian di tahun 2016 terjadi penurunan angka, tetapi sampai kepada tahun 2017 angka kembali meningkat yang dimana peningkatannya sangat pesat. Ini kemudian yang harus diantisipasi oleh pihak manajemen perusahaan karena peningkatannya sangat pesat dan sangat jauh dari angka-angka ditahun-tahun sebelumnya. Saya berharap kedepannya pihak manajemen perusahaan harus lebih efektif, efisien dan ekonomis lagi dalam pembiayaan non operasional perusahaan sehingga angkanya dapat kembali ditekan kebawah.

Semua persoalan yang dihadapi pihak pengelola keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros. Saya melihat masih tetap mampu menghasilkan profit dari tahun ke tahun, dan jumlah profit yang dihasilkan masih tetap terus meningkat meskipun dalam pengelolaannya masih ada yang kurang efektif dan efisien. Itu dapat dilihat dari jumlah pendapatannya, baik dari pendapatan usaha

dan pendapatan lain-lain. Meskipun di pendapatan lain-lain pada tahun 2017 terjadi penurunan. Tetapi total keseluruhan jumlah pendapatan sampai pada tahun 2017 dapat menyentuh angka 21.695.277.110,95. Angka ini sangat tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga jumlah total laba/rugi bersih sampai pada tahun 2017 juga lebih tinggi daripada di tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwasanya kinerja pihak manajemen keuangan terbilang baik dilihat dari sudut pandang proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Karena sistem pengelolaan keuangan masih terbilang efisien dan efektif dilihat dari tingkat presentasi tabel laporan rasio perkembangan pendapatan dan beban yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa tingkat presentase pendapatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan beban perusahaan. Selain daripada itu juga tingkat presentase piutang perusahaan juga memang terjadi kenaikan dalam dua tahun terakhir, tetapi jumlah presentase laba rugi bersih masih mampu menutupi tingkat presentase piutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega F. Syahril Ventje Ilat "Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung" (2015) yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung adalah Sangat Efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros telah sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup dari usaha penyedia jasa air PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros.
2. Pengelolaan keuangan PDAM Tirta Bantimurung Kab.Maros secara keseluruhan cukup baik dengan tingkat perkembangan yang relative cukup besar sebagai akibat dari pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif,sekalipun pengelolaan piutangnya masih perlu ditingkatkan lagi.

B. Saran

1. Sistem pengelolaan keuangan tetap dipertahankan sesuai aturan pemerintah yang mengacu pada pengelolaan akuntansi sector public.
2. Disarankan agar pengelolaan piutang khususnya pengelolaan piutang lebih ditingkatkan pengendaliannya menggunakan sistem anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, Z., Suhartana, W, F. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenada media Group: Jakarta
- Horne,J.C.V.,dan Wachowicz. J. M. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta
- Hery. 2017. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep Dan Analisis*. PT. Grasindo: Jakarta
- Rudianto. 2008. *Akuntansi Manajemen*. PT.Grasindo: Jakarta
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Suaka Media: Yogyakarta
- Sule, E. S., dan Saefullah, K. 2009. *Pengantar Manajemen*. Kencana Perdana Media Grup: Jakarta
- Sugiono, A. 2009. *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Sugioono, A., Soenarno,Y. N., dan Kusumawati, S. M., 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Samryn. L. M. 2012. *Akuntansi Manajemen Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta
- Yusuf,M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana: Jakarta
- Zamzami, F Nusa, N, B. 2017. *Akuntansi Pengantar I*. PT.Grasindo: Jakarta
- Helfert, E. A. 1995. *Teknik Analisa Keuangan*. Edisi ke-7. Erlangga: Jakarta
- Azly, Rahmadi. 2013. *Pengertian efektivitas Dan efisiensi*. Antarberita.blogspot.com



RIWAYAT HIDUP



Firdaus lahir pada tanggal 24 November 1995 di Mallawa. Penulis adalah anak pertama yang lahir dari pasangan Ayahanda Muh.Arfaq dan Ibunda Andi Dawiah.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri sejak tahun 2003 dan tamat pada tahun 2008 di sekolah SDN 13 WT. Mallawa

Kab.Maros untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama penulis melanjutkan di SMP NEG. 5 Bontang Kalimantan Timur dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis lanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan pada SMK.T.AN-NAS Mandai Mandai Kab. Maros Jurusan Air Frame And Power Plan dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Klimaks dari studi penulis yaitu pada hari sabtu, Tanggal 31 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WITA dengan dilaksanakannya Ujian Skripsi yang merupakan tahap akhir penyelesaian studi dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) momen ini menandakan berakhirnya Studi penulis pada jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.